

STUDI TENTANG NEGARA DALAM PANDANGAN AL-QUR'AN PADA MASYARAKAT LAMPUNG

Supriyatmoko*

Abstract

The state has succeeded in captivating the imaginations of political theorists, because it has been central to their questions since Plato's time. It is almost impossible to theorize a phenomenon, whether it is a text on gender relations, family, religion, ecology, law, human rights, culture or literature, without reference to the state as a codification of power from the social formations that contextualize and regulate these social phenomena. By paying attention to the key words, even though they are all cursory, it can be concluded that in the Qur'an there is no explicit concept of the state. In the Qur'an, there are only basic principles that must be realized in a country, especially those applied to the people of Lampung. These basic principles are as follows: Adhering to the principles of monotheism; There is a guarantee of security; The basic needs of the community are met; and Oriented to the future and for the common good.

Keyword: Negara, al-Quran, Masyarakat Lampung

Pendahuluan

Bila dirunut ke belakang dan masuk dalam bilik-bilik sejarah masa lalu, salah satu yang menarik sekaligus mengesankan tentang sejarah masa lalu, salah satu yang menarik sekaligus mengesankan tentang sejarah Islam adalah kekayaan di bidang politik. Hal ini misalnya dapat dicandra dari pemaparan sejarah Islam pada awal kemunculannya dipenuhi dengan kisah kejayaan nabi Muhammad saw. dan perluasan daerah yang begitu spektakuler yang dilakukan oleh umat Islam setelah beliau wafat.

* Penulis merupakan Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Bustanul Ulum Lampung Tengah.

Sementara itu di sisi lain, sejarah juga mengabadikan bahwa perpecahan, pertentangan, dan bahkan pertumpahan darah sesama umat Islam, sejatinya dipantik oleh persoalan di bidang politik. Fakta historis ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan kenegaraan. Hal ini kian kentara setelah umat Islam, akibat ekspansi dan perluasan wilayah, dipengaruhi oleh Aryanisme Persia. Sebab, setelah bersentuhan dengan Persia, di kalangan umat Islam mulai dikenal dengan ungkapan “Islam adalah agama dan negara” atau “*al Islam Din wa Dawlah*” (Musdah, 2001: 1). Kajian ini kian menarik karena semua kekuasaan politik yang muncul di bumi Islam sejak tahun 632 menyatakan diri berlandaskan ajaran-ajaran al-Qur’an, tuntunan Nabi, dan mengemban tugas mulia sebagai penjaga ajaran-ajaran tersebut (Arkoun, 1998: 221).

Menimbang kenyataan tersebut, cukup alasan kiranya tulisan yang diajukan oleh sejumlah pengamat, bahwa persoalan yang pertama-tama muncul dalam agama Islam adalah persoalan di bidang politik dan bukannya dalam bidang teologi. Setelah persoalan politik baru kemudian mengeksor masalah teologi (Nasution, 2002: 3).

Tulisan ini dapat dibuktikan salah satu, misalnya, dengan lahirnya aneka aliran dan golongan dalam teologi Islam pasca terbunuhnya khalifah ketiga, Usman bin Affan. Sebagaimana diketahui, lahirnya aneka dan golongan dalam teologi Islam, mulai dari yang tradisional, moderat, hingga yang ekstrim sekalipun, *notabene* berawal dari persoalan politik, terutama pasca terbunuhnya Usman bin Affan (Musdah: 1).

Menurut Nurcholis Madjid, membicarakan hubungan agama dan politik atau menyoal negara dalam agama Islam, tidak akan pernah kering digali dan senantiasa aktual diperdebatkan. Sebab, membicarakan topik tersebut ibarat menimba air zam-zam di tanah suci yang tak kunjung habis. Setidaknya, mengikuti pendapat Cak Nur, terdapat tiga alasan mengapa pembahasan politik dalam islam senantiasa aktual dan menarik (Madjid, 1998: 48).

Pertama, karena kekayaan sumber bahasan. Hal ini merupakan buah dari 15 alaf sejarah akumulasi pengalaman dunia Islam dalam membangun kebudayaan dan peradaban. Kedua, kompleksitas pembahasan. Sehingga membahas suatu persoalan dengan sendirinya juga akan menyinggung persoalan lain yang nyata-nyata menghajatkan satu atau beberapa pintu pendekatan yang terbatas. Begitu juga pembahasan yang menyeluruh, tidak saja membutuhkan kemampuan yang optimal, melainkan juga kesadaran untuk menjauh dari reduksionalisme dan penyederhanaan persoalan. Ketiga, pembahasan Islam dan politik atau menyoal islam dan negara, mau tidak mau akan melibatkan pandangan ideologis dari berbagai kelompok masyarakat, terutama pandangan umat Islam sendiri.

Pembahasan

Teori tentang Negara

Sebelum membicarakan negara perspektif al-Qur'an, terlebih dahulu akan dipaparkan sekilas tentang teori negara yang dibedakan oleh pemikir di bidang kenegaraan. Menurut pakar tentang kenegaraan, sebagaimana yang dirangkum oleh M. Amin Rais, terdapat dua teori mengenai negara di era modern, di mana kedua teori tersebut saling bertentangan. Pertama, teori Hagel. Menurut Hegel, negara adalah perwujudan dari ide suci atau *ide Ilahi (Divine idea)* di muka bumi. Citra Hegelian tentang negara adalah bahwa negara merupakan inkarnasi ide suci. Dengan arti kata, dalam tesis Hegelian, negara menjadi sesuatu yang didewakan dan disanjung tinggi, yang berhak menuntut apapun terhadap para warganya.

Ujung dari tesis Hegel ini adalah bahwa hanya dalam negaralah cita-cita manusia dapat diwujudkan. Negara adalah rumah kebaikan dan tempat untuk mewujudkan harapan Bersama. Oleh sebab itu, negara berada di atas segala-galanya dan konsekuensinya setiap warga negara harus menyerahkan seluruh dedikasinya kepada negara.

Kedua, teori Marx, meskipun mendakukannya sebagai murid spiritual Hegel dan ini dilontarkannya dalam berbagai kesempatan, namun pandangan Marx mengenai negara sama sekali bertolak belakang dengan Hegel. Menurut Marx, negara adalah tempat pelembagaan berbagai penindasan, alat operasi, dan mesin eksploitasi negara terhadap warganya. Negara merupakan tempat pemilik modal dan penguasa alat-alat produksi penindasan kaum lemah dan kaum pekerja.

Sebagaimana diketahui, yang menjadi sasaran tembak perspektif Marxian adalah terjadinya revolusi sosialis, naiknya kaum proletariat, dan lahirnya masyarakat tanpa kelas. Jika Hegel memuja berdirinya negara sebagai tempat mewujudkan cita-cita masyarakat, justru bagi Marx lenyapnya negara sebagai kebijakan puncak (*summum bonum*).

Bila didiskusikan lebih jauh, kedua teori tersebut tidak sebatas terkesan paradoks, namun juga memanggul ambivilensi dalam kehidupan individual dan kolektif. Negara di satu sisi, dipersangkakan sebagai Lembaga yang koersif, yang menindas hak-hak individu dan membatasi gerak-gerik seseorang. Namun di ujung sisi lain, negara didaulat sebagai pemberi perlindungan dan keuntungan tertentu kepada para anggotanya, seperti akses hak-hak kewarganegaraan, pelayanan sosial, dan lain sebagainya.

Negara Perspektif Al-Qur'an

Konsep dasar dalam filsafat politik adalah konsep tentang negara. Oleh sebab itu, semua gagasan politik lainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, senantiasa berkaitan dengan pembicaraan tentang negara. Namun di dalam al-Qur'an tidak ditemukan teori tentang negara, baik secara terinci ataupun tidak terinci. Bahkan kata *dawlah* yang di era modern berkonotasi negara, sama sekali tidak ditemukan rujukannya dalam al-Qur'an. Begitu juga, kata *dawlah* tidak dijumpai dalam Bahasa arab klasik (Qamaruddin, 1995: 1).

Di dalam al-Qur`an kata *balad* dipahami sebagai konsep negara dalam Islam. Sebagaimana diketahui, *balad* atau *balдах* merupakan bentuk tunggal dari *bilad*. Kata *balad* dan derivasinya tercantum dalam 19 ayat al-Qur`an (Munawir, 2002: 279). Meskipun bersumber dari akar kata yang sama dan berkaitan dalam al-Qur`an, ketiga kata tersebut digunakan dalam hal yang berbeda-beda.

Kata *balad* berarti suatu tempat yang meliputi wilayah relative luas dan berkonotasi geografis. Kata *balдах* lebih condong digunakan untuk menyebut suatu wilayah yang relatif lebih sempit dan berkonotasi birokratis. Sedangkan kata *bilad* dipakai untuk merujuk pada negara tertentu dalam sejarah sebelum Islam lahir.

Kendati demikian, dalam al-Qur`an terdapat istilah-istilah kunci perihal prototip negara. Istilah-istilah tersebut adalah *al-balad at-thoyibah*, *al-balad aminan*, *balдахun thoyibatun wa rabbun ghafur* dan *al-balad al-amin*. Keempat istilah ini katakanlah sebagai prototip negara ideal perspektif al-Qur`an, penulis mencoba membahas dengan memperhatikan ayat sesudah dan sebelumnya.

Al-Balad at-Thoyib

Terjemahannya:

“Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan izin tuhan; dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kebesaran kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS. al-A`raf: 58)

Ayat ini memaparkan perihal tanda-tanda kekuasaan Allah. Bila diperhatikan konteks ayat sebelumnya adalah membicarakan kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah secara baik dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi. Hal ini harus dilakukan manusia, karena Allah telah menganugerahkan kepada manusia berbagai kebaikan dan kemudahan. Dalam konteks ini adalah menyuburkan tanah yang sebelumnya tandus dan kering

kerontang. Caranya, Allah Swt mengirim angin dan menurunkan hujan. Sehingga, dari daerah yang sebelumnya daerah tandus kemudian berubah menjadi tanah yang ditumbuhi dengan aneka macam buah-buahan. Kendati demikian, Allah Swt memberikan catatan bahwa tanah yang subur belum tentu akan memberi berkah dan memberi kehidupan bagi pemiliknya. Semua itu terjadi berkat izin dan kekuasaan Allah swt.

Al-Balad Aminan

“Dan ingatlah Ketika Ibrahim berdoa, “ Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman dan jauhkan aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala”. (Qs. Ibrahim: 35)

Ayat di atas mengangkat tema tentang doa nabi Ibrahim Ketika berada di Makkah. Pada waktu itu, tidak seramai saat ini. Lingkungan sekitarnya tidak subur dan kehidupan masyarakatnya tidak semarak seperti sekarang. Selain meminta keamanan demi keberlangsungan hidup warganya, dalam doanya Nabi Ibrahim juga meminta agar keturunannya kelak yang menghuni daerah itu dijauhkan dari menyembah berhala. Dalam ayat berikutnya dijelaskan, bahwa berhala-berhala tersebut akan menyesatkan manusia.

Konteks ayat sebelumnya adalah berisi perintah kepada mereka yang telah beriman supaya mendirikan shalat dan mendermawankan sebagian hartanya yang telah dikaruniakan kepada mereka. Di antara karunia Allah swt adalah penciptaan langit dan bumi, menurunkan hujan dan menganugerahkan aneka buah-buahan.

Baldatun Toyyibah

Dalam al-Qur`an dijelaskan yang artinya *“ Sungguh bagi kaum Saba` ada tanda (kebesaran Allah Swt) di tempat tinggal*

mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kepada mereka dikatakan), makanlah kamu dari rizki yang telah dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu adalah) negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". (Qs. Saba` : 15)

Dalam sebuah riwayat dikatakan, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan Farwah Ibn Masik al-Ghathafani kepada Rasulullah saw, “ Ya Nabi Allah, pada zaman jahiliyah kaum Saba` merupakan kaum yang gagah berani dan kuat. Aku takut sekiranya mereka menolak masuk Islam. Apakah aku boleh memeranginya? lalu Rasulullah bersabda: ‘Aku tidak diperintahkan apa-apa berkenaan dengan mereka.’ Maka turunlah qs. Saba` : 15,16,17 yang menjelaskan keadaan kaum Saba` yang sesungguhnya (Qamaruddin, 1984: 413).

Al-Balad Al-Amin

“dan demi negeri (Mekah) yang aman ini”.

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa negeri yang aman itu adalah kota Mekah. Sebagaimana diketahui, Mekah merupakan daerah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Sebuah daerah di mana segenap warganya hidup dengan nyaman dan berkecukupan. Kecuali hidup berkecukupan secara material, Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah agar kelak keturunannya juga dibekali hidup dengan prinsip-prinsip tauhid, atau aspek spiritualitasnya juga dapat memberi pencerahan terhadap kehidupan keturunannya.

Simpulan

Negara telah berhasil mempesonakan imajinasi para teorikus politik, karena menjadi sentral berbagai pertanyaan mereka sejak zaman Plato. Hampir tidak mungkin untuk menteorisasikan suatu fenomena, apakah itu teks tentang hubungan gender, keluarga,

agama, ekologi, hukum, hak asasi, kebudayaan atau kesusastraan, tanpa bereferensi pada negara sebagai kodifikasi kekuasaan dari formasi sosial yang mengkontekstualisasi dan mengatur fenomena-fenomena sosial ini. Dengan memperhatikan kata-kata kunci, meski serba sekilas-sepintas, dapat disimpulkan bahwa di dalam al-Qur'an tidak terdapat secara eksplisit konsep tentang negara. Di dalam al-Qur'an, yang ada hanyalah prinsip-prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam sebuah Negara, terutama yang di terapkan pada masyarakat Lampung. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut: Berpegang pada prinsip-prinsip tauhid; Adanya jaminan keamanan; Kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi; dan Berorientasi ke masa depan dan demi kebaikan bersama.

Daftar Pustaka

- Arkoun, Mohammed. 1998. *Kajian Tentang Berbagai Kegiatan Antara Islam dan Politik; Suatu Pengantar, dalam Kajian Temporer al-Qur'an*, terj. Hidayatullah. Bandung: Pustaka
- Chadoke, Neera. 2001. *Benturan Negara dan Masyarakat Sipil*, terj. Slamet Susanto Yogyakarta: Istawa & wacana.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro
- Khan, Qomaruddin. 1995. *Tentang Teori Politik Islam*, terj. Taufik Adnan Amal, cet. Ke 2. Bandung: Pustaka
- Madjid, Nurcholis. 1998. *Islam dan Politik: Suatu Tinjauan Atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan*, jurnal Pemikiran Islam Paradigma, volume I, Nomor I, Juli-Desember
- . 2003. *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, cet. Ke-5. Jakarta: UI Press
- Mulia, Musdah. 2001. *Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal*. Jakarta: Paramadina
- Nasution, Harun. 2002. *Negara Islam: Aliran—Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, cet. Ke-2. Jakarta: UI Press

- Rais, M. Amin. 1984. *Khilafah dan Imamah*, terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Mizan
- Shaleh, Qomaruddin, dkk. (penyadur). 1984. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, cet. Ke-4. Bandung: Diponegoro
- Sadzali, Munawir, dkk. (ed). 2002. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa